

12 KEPENTINGAN PEREMPUAN

Dki Jakarta Dalam Pemilu 2014



Pemenuhan Pangan berkualitas, murah mudah di akses oleh masyarakat 1

- ▶ Ketersediaan bahan pangan atau makanan yang berkualitas, murah, sehat, dan dapat di akses oleh masyarakat
- ▶ Terjaganya kualitas Bantuan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan terdistribusi ke sasaran yang tepat (pengawasan ketat terhadap distribusi)
- ▶ Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pangan lokal dengan membatasi pangan Impor, murah nya harga pangan lokal, dan menjaga kualitas pangan lokal
- ▶ Adanya kebijakan dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan manipulasi data maupun penimbunan pangan lokal
- ▶ Adanya kebijakan yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam menggunakan bahan beracun dan berbahaya untuk makanan olahan atau bahan pangan
- ▶ Pemerintah melakukan pemantauan ketat terhadap produksi dan distribusi makanan instan
- ▶ Pemerintah menyediakan lahan untuk pangan lokal dan membatasi pembangunan yang menggusur lahan untuk pengelolaan pangan maupun perkebunan swasta berskala besar

Pemenuhan Lingkungan yang Sehat 2

- ▶ Pemerintah menyediakan Sumber daya dan Tempat untuk pembuangan sampah yang bisa di akses oleh masyarakat
- ▶ Menambah dana untuk mengangkut sampah dan membayar pekerjanya
- ▶ Adanya tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan merusak lingkungan
- ▶ Pemerintah membatasi pembangunan gedung maupun infrasturktur yang dapat memengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan
- ▶ Ditambah dan dijaganya lingkungan penghijauan dan daya serap air
- ▶ Alokasi dana untuk pelatihan bagi perempuan agar sampah menjadi atau bernilai ekonomi

Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. 3

- ▶ Tempat kesehatan murah/gratis, mudah di akses, berkualitas dan memiliki fasilitas cukup yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu
- ▶ Pelayanan pengobatan dan rawat inap yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa melihat status social seseorang
- ▶ Masyarakat dapat mengakses pembelian obat yang murah namun berkualitas (bukan generic)
- ▶ Adanya tempat yang murah, mudah diakses, berkualitas, dan menyediakan fasilitas untuk perempuan melakukan konsultasi dan penanganan terkait kesehatan reproduksi perempuan
- ▶ Jampersal di lanjutkan untuk masyarakat menengah kebawah agar kebutuhan persalinan terpenuhi dengan baik
- ▶ Penambahan alokasi dana Jampersal agar terpenuhinya kebutuhan perempuan yang melahirkan, serta kebutuhan ibu dan anak
- ▶ Mengalokasikan dana untuk kontrasepsi KB (Pil Ayudi, Impian, dll)
- ▶ BJS gratis tanpa adanya premi
- ▶ Tidak adanya calo di tempat pelayanan kesehatan dengan tindakan tegas dan keras bagi yang melakukannya.
- ▶ Alokasi anggaran APBN 20% bagi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan.

Menghargai Keberagaman atau Pluralisme 4

- ▶ Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan, keamanan, dan keselamatan berbagai kelompok untuk mengekspresi kepentingan atas dasar agama, suku, kepercayaan, budaya, seni, dan social
- ▶ Adanya tindakan tegas terhadap individu maupun kelompok yang mengancam pluralisme atau melakukan kekerasan atas nama SARA
- ▶ Menghormati pluralisme dengan tidak adanya larangan individu atau kelompok tertentu

Kebijakan yang menolak privatisasi air 5

- ▶ Layanan air yang berkualitas, bersih, sesuai dengan standard kesehatan (tidak keruh, tidak berbau, dan tidak mengandung bahan beracun berbahaya), murah, dan mudah diakses
- ▶ Pengelolaan air bersih harus dikembalikan ke PDAM secepatnya
- ▶ Mengalokasikan subsidi air bersih 20% untuk pemenuhan air bersih, murah berkualitas agar terjangkau untuk masyarakat miskin

Menentukan keputusan dan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya 6

- ▶ Adanya kebijakan pemerintah yang melindungi perempuan dalam menentukan pilihan sendiri dalam suatu pengambilan dengan cerdas dan kritis

Terjaminnya Keamanan untuk Perempuan 7

- ▶ Keamanan dan kenyamanan perempuan di ruang public dengan adanya perlindungan dan pencegahan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- ▶ Transportasi yang aman, khususnya untuk perempuan, misalnya tersedianya mobil angkutan khusus perempuan dan anak
- ▶ Diperbanyaknya fasilitas di transportasi umum seperti gerbong khusus perempuan, orang rentan, keterbatasan (cacat), anak, dll
- ▶ Perlindungan hak-hak buruh perempuan yang baik bekerja di dalam maupun di luar negeri
- ▶ Adanya pembekalan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya perempuan yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan

Korupsi 8

- ▶ Tindakan tegas pada pelaku koruptor
- ▶ Laporan transparan terkait dana/barang sitaan koruptor
- ▶ Dana/barang hasil sitaan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat

Memastikan Listrik murah dan aman Bagi Masyarakat Marginal 9

- ▶ Mensederhanakan system listrik dan disosialisasikan kepada masyarakat (system penayaran voucher lebih mahal di banding prabayar)

Penggusuran yang tidak merugikan 10

- ▶ Pemberian ganti rugi yang tidak merugikan
- ▶ Adanya fasilitas layak yang tidak dipungut biaya atas ganti rugi dari penggusuran
- ▶ Adanya musyawarah dengan masyarakat terkait keputusan penggusuran untuk menghindari penggusuran paksa/liar

Memastikan tersedia lapangan kerja bagi perempuan dan tidak diskriminatif 11

- ▶ Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menghapuskan kontrak kerja
- ▶ Gaji disesuaikan dengan UMR yang berlaku
- ▶ Pemerintah melakukan strategi maupun kerjasama dengan pihak-pihak yang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya
- ▶ Menciptakan lapangan kerja sesuai dengan SDM dan tidak membedakan fisik
- ▶ Meningkatkan fungsi pengawasan keselamatan kerja agar tidak ada pengusaha yang mempermainkan keselamatan hak-hak buruh
- ▶ Dihapuskannya peraturan system outsourcing yang telah menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang menyebabkan masyarakat khususnya perempuan terpuruk

Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu 12

- ▶ Pendidikan gratis 12 tahun yang berkualitas
- ▶ Merata dan terjaganya fasilitas dan sarana yang mendukung pendidikan
- ▶ System pendidikan (kurikulum) yang tidak selalu berubah dan disesuaikan dengan usia anak
- ▶ Pemerintah mengeluarkan Kartu Pintar secara merata di seluruh Indonesia
- ▶ Adanya kebijakan dan tindakan tegas untuk institusi pendidikan yang melakukan 'sumbangan liar' yang memaksa
- ▶ Pemerintah lebih memperhatikan kondisi guru honor atau adanya perlindungan dan kesejahteraan untuk guru honor
- ▶ Pemerintah harus ketat mengawasi dana pendidikan agar tepat sasaran
- ▶ Alokasi anggaran APBN 20% bagi pendidikan